



CITRA PEREMPUAN KOLONIAL DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI SUMATERA TIMUR, 1870-1942

Suriani*, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

Tiara Desthy Afrina, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

Wilda Febriani, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

ABSTRACT

The opening of tobacco plantations in East Coast Sumatra in 1870 became a major factor in the creation of ethnic, cultural, and religious diversity in there. All the Malays there were Muslim, then the Europeans came with their Christianity, which was followed by most of the Batak people, the Indians brought Hinduism and Sikhism, and the Chinese brought Buddhism. East Coast Sumatra is a pluralistic region, but there has never been a conflict between ethnicities or religions. Very interesting. However, the reality of the religious life of the people at that time had never been revealed in detail. Furthermore, during the 1930 census it was recorded that there were 4.293 Europeans in Medan and 2.001 of them were women, but their presence in the religious sphere has not been exposed. Therefore, this study aims to narrate the image of colonial women in religion in East Coast Sumatra. The images of colonial women in this study are all forms of mental, spiritual, and daily behaviour expressed by women in religion, including the outward appearance that appears in women and their religious activities in East Coast Sumatra in the period 1870-1942. This study uses the historical method, and the primary data are the Dutch Colonial Government Report (verslag), Volkstelling 1930, maps, newspapers, bulletins and magazines, photographs depicting the religious life of the people of East Sumatra in the period 1870-1942.

ARTICLE HISTORY

Received 18/02/2023
Revised 27/02/2023
Accepted 12/03/2023
Published 20/03/2023

KEYWORDS

East Coast Sumatra; religious life; women portrayal; 1870-1942.

CITATION (APA 6th Edition)

Suriani., Afrina, T. D., Febriani, W. (2023). Citra Perempuan Kolonial dalam Kehidupan Beragama di Sumatera Timur, 1870-1942. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 223-234.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ suriani@uinbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.7042>

PENDAHULUAN

Kehadiran pendatang di Sumatera Timur sejak dibukanya perkebunan tembakau pada 1870 menjadikan Sumatera Timur sebagai wilayah yang plural. Tidak hanya plural dalam kesukuan, tetapi juga plural dalam agama. Orang Eropa datang membawa serta agama Kristen mereka, baik itu Protestan ataupun Katolik-Roma yang kemudian banyak dianut oleh orang-orang Batak (inilah yang membenarkan penyebutan Melayu Islam dan Batak Kristen), orang India membawa agama Hindu dan Sikh, dan orang Tionghoa (Cina) membawa ajaran Konfusius (Buddha).

Dalam kondisi yang plural tersebut, dinamika kesukuan dan keagamaan di Sumatera Timur relatif aman, karena tidak pernah terjadi konflik besar yang berarti. Meski tidak ada konflik ataupun penolakan terhadap golongan-golongan tertentu, yang muncul kemudian adalah pemisahan-pemisahan wilayah huni dari masing-masing entitas tersebut (Buiskool, 2005). Pemisahan tersebut dilakukan sebagai upaya dari masing-masing entitas, terutama komunitas orang Eropa untuk melindungi diri mereka, karena mereka merasa tidak aman dan nyaman jika harus tinggal bersama dengan masyarakat pribumi atau pendatang lainnya.

Orang Eropa yang sudah menetap di Sumatera Timur, kemudian membangun gereja mereka untuk mereka beribadah, begitu pun orang Cina dan India yang membangun kelenteng dan kuil. Hingga saat ini, kita dapat menemukan beberapa gereja-gereja tua yang dibangun pada masa itu yang masih difungsikan sebagai tempat ibadah di Medan, juga kelenteng dan kuil, namun hanya tersisa sedikit, sedangkan yang lainnya sudah hancur karena masa ataupun dihancurkan. Kehidupan beragama masyarakat di Sumatera Timur pada masa itu berjalan dengan damai, masing-masing penganut agama bebas melakukan ibadah atau melakukan perayaan-perayaan hari besar keagamaan



mereka tanpa ada larangan dari pemerintah. Setiap orang, laki-laki ataupun perempuan dapat dengan aman pergi ke mesjid, gereja ataupun ke tempat ibadah lainnya.

Meskipun Sumatera Timur tumbuh menjadi daerah yang plural dengan budaya dan agamanya, sangat disayangkan kajian mengenai sejarah kehidupan beragama yang beragam tersebut secara khusus belum pernah disentuh. Selama ini, kajian sejarah yang dilakukan lebih banyak tentang kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan buruh dan perkebunan. Adapun yang membahas persoalan keragaman entitas pada akhirnya malah bermuara pada narasi kepentingan ekonomi dan kesenjangan ekonomi (Perret, [2010](#)).

METODE

Kajian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan data primer berupa Laporan Pemerintah Kolonial Belanda (*verslag*), *Statsblad* 1870-1900-an. Hasil Sensus 1930 (*Volkstelling* 1930), peta-peta, koran-koran seperti: *De Sumatera Post*, *Sinar Deli*, *Pewartar Deli*, *Pelita Andalas*, serta buletin (*tijdschrift*) keagamaan yang terbit di Sumatera Timur pada masa kolonial (1870-1942), juga foto-foto yang menggambarkan perempuan dalam kehidupan beragama masyarakat Sumatera Timur. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal terkait perempuan dan Sumatera Timur. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dikritisi dengan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya diinterpretasi dan dituliskan menjadi sebuah bentuk historiografi (Kuntowijoyo, [2021](#); Wasino, [2018](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkebunan, Perubahan Ekonomi dan Modernisasi

Paruh kedua abad ke-19 M menjadi momen perubahan bagi Sumatera Timur. Pengusaha swasta Eropa, yang dirintis oleh Jacobus Nienhuys, seorang berkebangsaan Belanda mulai berinvestasi dalam usaha perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Awalnya Nienhuys ditugaskan oleh perusahaan *Pieter van den Arend & Co* untuk mengelola perkebunan tembakau di Jawa Timur, kemudian ia bertemu dengan peniaga Said Abdullah di Surabaya (Broersma, [1932](#)). Said Abdullah menceritakan kepada Nienhuys bahwa Deli di Sumatera Timur adalah daerah penghasil tembakau yang potensial. Nienhuys tertarik dan kemudian memutuskan pergi ke Deli (Sumatera Timur) (Pelzer, [1985](#)). Nienhuys akhirnya tiba di Deli (Sumatera Timur) pada akhir tahun 1863 (Said, [1977](#)).

Pada tahun 1889, jumlah perkebunan tembakau milik para pemodal swasta Barat telah mencapai 153 perkebunan, dengan perincian 47 di Deli, 33 di Langkat, 28 di Serdang, 16 di Padang Bedagai, 10 di Batubara, 9 di Asahan, 9 di Siak, dan 1 di Bilah (Broersma, [1932](#)). Sebagian besar perkebunan dimiliki perusahaan besar dan selebihnya milik pengusaha perorangan. Selain *Deli Maatschappij*, ada beberapa perusahaan besar lainnya yang beroperasi dalam budidaya tembakau, di antaranya *Senembah Maatschappij*, *Deli Batavia Maatschappij*, *Tabak Maatschappij Arensbrug* milik konsortium *Pieter v. d. Arend & Co*, dan *United Langkat Plantations Company* (modal Inggris). Perusahaan-perusahaan besar itu tergabung dalam *Deli Planters Vereeninging* (DPV) yang dibentuk tahun 1879 atas prakarsa J. T. Cremer (Pelzer, [1985](#)).

Perkembangan perkebunan tembakau milik para pemodal swasta Barat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan ekonomi penduduk lokal. Ketika pengusaha swasta Barat mengeksploitasi hampir seluruh lahan di Deli, kebanyakan penduduk yang menetap di pinggiran tanah konsesi tidak lagi mempunyai ladang atau huma sebagai milik sendiri. Mereka menjadi “rakyat penunggu”, menantikan lahan tembakau milik swasta Barat yang telah selesai dipanen, yang dinamakan tanah *jaluran*. Tanah *jaluran* hanya dapat ditanami penduduk dalam waktu singkat dengan jenis tanaman padi dan jagung (Pelzer, [1985](#)). Akan tetapi, penduduk lokal juga mampu memanfaatkan kesempatan ekonomi baru yang dimunculkan oleh perkembangan perkebunan,

seperti berdagang kecil-kecilan dan membuat atap nipah untuk dijual ke pengusaha perkebunan yang digunakan sebagai material bangunan bangsal tembakau. Bahkan ketika perkebunan karet milik swasta Barat berkembang pesat pada awal abad ke-20 M, orang-orang Karo di Dusun Deli, daerah dataran tinggi, masih memiliki kesempatan membudidayakan karet meskipun jumlah tanamannya kecil (Pelzer, 1985). Dengan adanya kesempatan ekonomi alternatif, penduduk setempat jarang sekali yang mau bekerja sebagai buruh di perkebunan. Kebutuhan pengusaha perkebunan akan tenaga kerja justru dipenuhi oleh tenaga kerja dari luar. Inilah yang menjadi momentum kehadiran kuli-kuli kontrak dari Jawa, Cina dan India.

Pertumbuhan sektor perkebunan didukung dengan adanya sarana transportasi yang memadai untuk mendistribusikan komoditas perkebunan ke pelabuhan Belawan. DSM telah membangun jalur kereta api sepanjang 553 kilometer yang menghubungkan daerah-daerah perkebunan dengan Pelabuhan sampai periode 1937 (Weilsfelt, 1972). Sementara itu, fasilitas jalan menjadi prioritas pemerintah. Menjelang tahun 1937, lebih dari 1.900 kilometer jalan telah selesai dibangun (Pelly, 2013). Pembangunan sarana transportasi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, karena jalan dan jalur kereta api yang menuju ke pelabuhan Belawan diarahkan melalui Kota Medan. Kondisi inilah yang telah mendukung Kota Medan menjadi pusat aktivitas perdagangan, sebagaimana diberitakan surat kabar *Pewarta Deli* berikut ini:

“...pedagang ketjil diloear Medan soedah oemoem setidaknja 2 kali seboelan menambah dagangannja, diambil ke Medan...” (“Pewarta Deli,” 1936).

Pusat perdagangan di Kota Medan adalah Kesawan yang terletak di sisi barat *eksplanade*. Sampai akhir abad ke-19 M, Kesawan masih merupakan “kedai panjang” atau deretan toko yang dibangun dari kayu. Pada tahun 1899, terjadi kebakaran di Kesawan yang menghancurkan seluruh kedai dan 67 rumah penduduk. Setelah peristiwa itu, pertokoan di Kesawan dibangun menggunakan material batu bata dan kebanyakan bangunan berlantai dua, lantai bawah sebagai toko dan lantai atas untuk tempat tinggal (Buiskool, 2005). Pada awal abad ke-20 M, Kesawan bukan hanya sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli yang secara teratur melakukan tukar menukar barang dan jasa, melainkan telah menjadi simbol modernitas kota dalam sektor ekonomi, seperti dilaporkan surat kabar *Pewarta Deli* berikut ini:

“Lorong Kesawan, *hoofdstraat* bagi kota Medan, dimana didapati beratoes ratoes toko toko pakaian jang besar, bank bank, firma assurantie dan lain lainnja. Disinilah didapati toko Bombay jang besar besar, toko pakaian orang Tionghoa, kepoenjaan orang Belanda, Inggeris dan Japan. Kepoenjaan bangsa kita? Ada djoega, tapi tinggal... tiga pintoe kedai” (“Pewarta Deli,” 1936).

Selain Kesawan, aktivitas perdagangan di Kota Medan juga dilakukan di beberapa pasar yang menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Sejak tahun 1886, Kota Medan telah memiliki sebuah Pasar Daging partikelir di *Oude Mark*. Pasar Ikan partikelir dibuka di *Spoorstraat* pada tahun 1888, dan Pasar Sayur dibuka di *Neuw Mark* pada tahun 1906 (Buiskool, 2005). Sayuran yang diperdagangkan di pasar partikelir dipasok dari kebun sayur penduduk di pinggiran kota. Namun untuk sayuran buncis, wortel, cabai, kentang, kol, dan arcis didatangkan dari dataran tinggi Berastagi yang menjadi daerah budidaya sayuran sejak awal dekade pertama abad ke-20 M (“Pewarta Deli,” 1928).

Ekonomi kota yang berorientasi pada perdagangan mendorong *Gemeente* membangun Pasar Petisah pada tahun 1915. Pada awal tahun 1920, *Gemeente* mengambil alih kepemilikan Pasar Ikan dengan membayar ganti rugi sebesar f 30.000 (“Pewarta Deli,” 1923). Sepuluh tahun kemudian, *Gemeente* mulai membangun Pusat Pasar di lokasi pacuan kuda yang terletak di Wilhelminastraat. Pembangunan Pusat Pasar baru selesai pada tahun 1933 (Buiskool, 2005).

Selain perdagangan, kemajuan ekonomi Kota Medan juga ditopang oleh kegiatan industri. Pada akhir dekade kedua abad ke-20 M, terdapat satu pabrik minyak kelapa dan satu pabrik penyemaian kulit yang telah berproduksi di Pulau Brayan. Kedua industri tersebut dimiliki oleh pengusaha Cina (Blink, 2018). Bahkan menurut laporan *Gemeente* tahun 1926, ada 16 pabrik roti, 9 pabrik sirop, 6 pabrik mie, dan 2 pabrik kecap yang beroperasi di Kota Medan (*Verslag Betreffende De Gemeente Medan Over Het Jaar 1926*, 1927).

Keberhasilan dan berkembangnya usaha perkebunan tembakau Nienhuys mengharuskannya untuk membangun kantor administrasi, dan pada tahun 1869 dibangunlah kantor *Deli Maatschappij* di Medan. Kantor tersebut dibangun di lokasi pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura yang dekat dengan perkampungan penduduk. Sebelum tahun 1879, bangunan-bangunan utama di Medan hanyalah kantor dan rumah sakit *Deli Maatschappij*, serta sebuah garnisun yang beranggota sekitar 100 orang (Perret, 2010). Setelah asisten residen Deli memindahkan pusat pemerintahannya dari Labuhan Deli ke Medan pada tahun 1879 pembangunan berbagai infrastruktur mulai dilakukan. Kantor pos dan gedung *Societiet* telah dibangun pada tahun 1879 (Sinar, 1991). Satu tahun kemudian, lahan terbuka di depan kantor pos dibuat menjadi alun-alun yang diberi nama *esplanade* (Passchier, 1995). Bahkan sejak tahun 1880, semakin banyak orang Cina yang mendirikan bangunan di Kesawan (Buiskool, 2005). Keadaan itu telah mendorong pemerintah Hindia Belanda menetapkan Medan sebagai *onderafdeeling* pada tahun 1881, yang dikepalai oleh seorang kontrolir.

Pada tahun 1887, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Medan sebagai ibukota keresidenan Sumatera Timur. Pada saat yang sama pula, Sultan Deli memindahkan pusat pemerintahannya dari Labuhan Deli ke Medan. Sejak saat itu Medan menjadi tujuan bagi orang-orang Eropa untuk memperluas ekspansi sumber daya ekonomi mereka. Keberadaan orang Eropa yang semakin banyak merupakan salah satu faktor yang mendorong pemerintah Hindia Belanda menetapkan Medan sebagai *Gemeente* pada tahun 1909. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Desentralisasi yang ditetapkan pada tahun 1903.

Pemerintah *Gemeente* memiliki wewenang dan hak untuk menentukan kebijakan pajak sendiri, mengatur anggaran keuangan sendiri, mengembangkan dan memelihara infrastruktur kota. Akan tetapi, tanah yang dikelola *Gemeente* belum sepenuhnya lepas dari kekuasaan Sultan Deli (*Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatra Timur Tahun 1800-1975*, 1978). Baru pada bulan November 1918, sultan menghibahkan tanah Kota Medan kepada *Gemeente* dengan hak *eigendom*, kecuali kampung sultan di Kota Maksim dan Kampung Sungai Kerah Percut (sebelah Utara-Timur dari Sungai Kerah), tanah yang dikuasai oleh gubernemen, dan tanah yang dipakai *Deli Spoorweg Maatschappij* (DSM) (Jansen, 1925). Sejak berdirinya sampai tahun 1937, DSM telah membangun jalur kereta api sepanjang 553 kilometer yang menghubungkan daerah-daerah perkebunan dengan pelabuhan (Weilsfelt, 1972). Sementara itu, fasilitas jalan menjadi prioritas pemerintah. Menjelang tahun 1937, lebih dari 1.900 kilometer jalan telah selesai dibangun (Pelly, 2013).

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa berkembangnya perkebunan tembakau direfleksikan pada gedung-gedung mewah yang ada di pusat kota Medan sebagai ibukota Sumatera Timur. Pada pusat kota terdapat *central square (the Esplanade)*. Di sebelah barat *Esplanade* menjadi permukiman etnis Eropa, kemudian perumahan dengan konsep *garden city* dibangun di kawasan Polonia. Pada sisi selatan *Esplanade* di sekitar Kesawan (merupakan jalan tertua di Medan) berkembang menjadi pemukiman Cina (*Chinatown*). Perkampungan penduduk pribumi berada di sekitar istana sultan di sebelah selatan kota. Selain itu berkembang juga permukiman untuk komunitas India yang disebut Kampung Keling atau Kampung Madras.

Sebagai sebuah kota kolonial, Medan mengalami proses modernisasi yang begitu pesat. Louis Couperus, seorang penulis Belanda, dalam catatan perjalanannya menggambarkan Medan sebagai

“kota yang betul-betul unik di Hindia Belanda. Modern dan bergaya Eropa; ia bernuansa Inggris karena bertetangga dengan Singapura, maka tak diragukan lagi Medan terpengaruh olehnya” (Couperus, 1992). Bangunan-bangunan berarsitektur Eropa, seperti *Witte Societeit*, Kantor Pos, *Gemeentehuis* (gedung kota pradja), *Javasche Bank*, *Hotel de Boer* dan Hotel Medan, kantor perusahaan *Horrison & Crossfield*, *Deli Maatschappij*, *Deli Proefstation*, *Deli Spoorweg Maatschappij*, *Firma Van Nie en Co.*, (seperti yang sudah ditunjukkan dalam gambar sebelumnya) merupakan simbol modernitas Kota Medan yang ada dalam catatan perjalanan Louis

Sumatera Timur, Medan terutama telah memiliki kelengkapan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Berbagai infrastruktur tersebut di antaranya, jalan raya, pusat pasar, jembatan, perusahaan listrik, perusahaan penyediaan air minum, rumah sakit, hotel, laboratorium penelitian penyakit tropis, bank, lapangan atau alun-alun, gedung pemerintahan, serta perusahaan transportasi kereta api (Avan, 2010). Pada tahun 1920-an, *Gemeente* melakukan perbaikan kampung. Program perbaikan kampung pada dasarnya terdiri dari pembangunan jalan dan jalan setapak yang dilengkapi dengan selokan (Blackburn, 2011). Namun pembangunan jalan yang dilakukan *Gemeente* tidak merata di semua kampung. Bahkan sampai tahun 1930-an, masih ada jalan di Kampung Keling yang tidak diberi penerangan oleh *Gemeente*, padahal perusahaan listrik telah membangun instalasi di kampung tersebut (“De Sumatra Post,” 1921). Ceylonstraat contohnya, jalan yang terdapat di Kampung Keling ini selalu ramai dilalui kendaraan pada malam hari, tapi sampai akhir tahun 1932 tidak memiliki lampu jalan (Sinar Deli, 1932).

Hakikatnya, pembangunan sarana infrastruktur dan fasilitas umum tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perkembangan ekonomi perkebunan. Infrastruktur tersebut berfungsi untuk menopang dan menunjang kegiatan perkebunan terutama orang-orang Eropa yang berdomisili di Medan. Pengembangan infrastruktur tersebut memanfaatkan pendanaan gabungan dari *Gemeente Fonds* dan kerja sama dengan Kesultanan Deli yang menyerahkan hasil pendapatan dari pungutan pajak kendaraan serta penerapan sumbangan sukarela dari penduduk (*Verslag Betreffende de Gemeente Medan over Het Jaar 1919*, 1920).

Modernisasi yang terjadi di Sumatera Timur tidak hanya berwujud pada bangunan-bangunan saja, akan tetapi juga dalam bentuk gaya hidup. Ramainya orang Eropa yang datang ke Sumatera Timur, membawa kebiasaan-kebiasaan mereka di Eropa ke Sumatera Timur. Salah satu kebiasaan tersebut misalnya kebiasaan orang Belanda melakukan rekreasi, yang berdampak pada pembangunan sarana rekreasi, hiburan dan olahraga bagi masyarakat Eropa yang ada di Sumatera Timur. Rekreasi dimanfaatkan sebagai pelepas rasa lelah setelah seharian atau beberapa hari bekerja di kantor pemerintahan atau di perkebunan. Tempat rekreasi yang biasa didatangi oleh orang-orang Eropa adalah Parapat dan Berastagi. Pembangunan sarana rekreasi, hiburan dan olahraga yang terjadi di Medan misalnya adalah berdirinya bioskop, lapangan olahraga, kolam renang. Bioskop pertama di Medan adalah *de Orange Bioscoop* pada tahun 1889. Kemudian menyusul *Rex Bioscoop* pada tahun 1918 dan *Deli Bioscoop*. Tiga tahun kemudian, *Astroria Bioscoop*, *Tjong Koeng Tat Bioscoop*. Berselang dua tahun kemudian *Imperial Bioscoop* di Brayan, *Orion Bioscoop* pada tahun 1931. Bioskop dimanfaatkan orang-orang Eropa sebagai sarana sosialisasi, bercengkerama dan membentuk ikatan relasi (Batubara, 2020). Selain itu, hiburan masyarakat Eropa juga didapat dengan adanya pasar malam, yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera Timur.

Perkebunan dan Segregasi Masyarakat

Sebagai pusat kegiatan ekonomi, Kota Medan menjadi daya tarik bagi para pencari kerja yang berasal dari luar kota. Mereka berdatangan ke Kota Medan untuk sekedar mengadu nasib atau mengejar keuntungan ekonomi. Akibatnya, jumlah penduduk Kota Medan meningkat pesat. Pada tahun 1920, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 45.248 orang, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1900. Jumlah itu meningkat tajam mencapai

76.584 orang pada tahun 1930. Penduduk yang memadati Kota Medan terdiri dari berbagai suku bangsa, namun data-data resmi pemerintah kolonial justru mengklasifikasikan penduduk Kota Medan menjadi empat kategori besar, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di berikut:

Tabel 1. Komposisi penduduk Kota Medan tahun 1900-1930

Tahun	Eropa	Bumiputra	Cina	Timur Asing	Lainnya	Total
1900	594	3.129	7.745	1.301		12.724
1905	954	3.195	6.397	3.705		14.251
1911	1.266	12.810	10.973	1.951		27.000
1920	3.128	23.823	15.916	2.381		45.248
1930	4.293	41.270	27.287	3.734		76.584

Sumber: *Volkstelling 1930*

Meskipun orang Cina terus bertambah jumlahnya dalam periode 1911-1930, tetapi mereka tidak lagi menjadi kelompok mayoritas di Kota Medan, karena pada saat yang bersamaan jumlah orang bumiputra meningkat cukup pesat. Pada tahun 1911, jumlah orang bumiputra di Medan mencapai 12.810 orang atau 47,4% dari total populasi, kemudian meningkat menjadi 41.270 orang atau 53,9% pada tahun 1930. Kenaikan jumlah penduduk bumiputra salah satunya bisa dijelaskan sebagai akibat adanya migrasi. Menurut sensus penduduk tahun 1930, jumlah imigran bumiputra di Kota Medan mencapai 24.594 orang atau 59,6% dari jumlah total penduduk bumiputra. Penduduk bumiputra yang menetap di Kota Medan berasal dari berbagai kelompok etnis, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi penduduk Kota Medan tahun 1900-1930

Kelompok Etnis	Jumlah	Persentase dari Keseluruhan Penduduk
Melayu	5.408	7,06
Karo	145	0,19
Jawa	19.069	24,90
Sunda	1.209	1,58
Banten	426	0,56
Batavia	1.118	1,46
Minangkabau	5.590	7,30
Mandailing	4.688	6,12
Angkola	236	0,31
Batak Toba	820	1,07
Etnis Bumiputra lainnya	2.561	3,34
Total	41.270	53,89

Sumber: *Volkstelling 1930*

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bumiputra di Kota Medan adalah etnis pendatang, sedangkan penduduk asli (Melayu dan Karo) jumlahnya hanya 5.553 orang atau 13,5% dari total populasi bumiputra. Kelompok etnis bumiputra terbesar adalah orang Jawa. Kebanyakan dari mereka merupakan bekas kuli kontrak perkebunan. Seperti dikemukakan Stoler, meskipun peraturan-peraturan secara khusus menetapkan pemulangan ke Jawa bagi pekerja yang telah berakhir masa kontraknya, tetapi setiap tahun ratusan orang Jawa justru tergeser ke luar lingkungan perkebunan. Sebagian dari mereka menjadi bagian dari “proletariat kota” di Medan. Mereka diduga bekerja sebagai buruh kasar untuk pedagang Cina. Namun beberapa malahan menjadi pedagang kecil dan produsen kecil dengan usaha sendiri (Stoler, 2005).

Etnis Minangkabau menempati urutan kedua dalam populasi bumiputra di Kota Medan. Kebanyakan perantau Minangkabau bekerja sebagai pedagang dan pengrajin. Kedatangan orang

Minangkabau ke Kota Medan bersamaan dengan kelompok-kelompok etnis dari dataran tinggi Tapanuli. Pendatang terbanyak dari dataran tinggi Tapanuli adalah orang Mandailing. Menurut Pelly, ketika orang Mandailing berpindah ke Sumatera Timur pada awal abad ke-20, mereka ditarik masuk Melayu. Etnis Melayu memperlakukan orang Mandailing sebagai “Melayu Dusun” dan berhak memiliki tanah adat. Banyak orang Mandailing yang lulusan madrasah dipekerjakan oleh Sultan Deli sebagai *Khadi* dan *Imam*, serta jabatan-jabatan lain dalam pengadilan agama. Orang Mandailing yang berpendidikan Barat cenderung bekerja sebagai pegawai kantor dalam pemerintahan kolonial dan perusahaan swasta (Pelly, 2013).

Sementara itu, jumlah orang Eropa yang tinggal di Kota Medan terus meningkat dalam kurun waktu 1900-1930, namun persentasenya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi bumiputra dan Cina. Penduduk Eropa di Kota Medan memiliki latar belakang kebangsaan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah orang Eropa, Asia dan Timur Asing di Sumatera Timur tahun 1930

Kebangsaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
Belanda	4553	3445	7998
Belgia	35	21	56
Denmark	40	26	66
Jerman	463	317	780
Inggris	383	201	584
Austria	34	30	64
Swiss	160	107	267
Jepang	424	448	872
Amerika	66	48	114
Indo-Eropa	66	79	145
Kebangsaan lain	73	52	125
Tidak dikenali	4	5	9
Total	6301	4779	11080

Sumber: *Volkstelling 1930*

Banyaknya Orang Eropa dari berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa Sumatra Timur menjadi tempat yang menjanjikan untuk didatangi. Rata-rata orang Eropa menguasai sektor padat modal di bidang perkebunan. Bahkan cukup banyak di antara mereka yang berusaha di bidang perdagangan. Selain itu terdapat pula sebagian dari mereka yang menjadi pegawai pemerintah, notaris, guru, jurnalis, dan pegawai perusahaan swasta (*Volkstelling 1930 Deel V*, 1935).

Menurut Pelly, orang-orang Eropa merupakan kelompok sosial teratas dalam stratifikasi masyarakat Kota Medan. Kelompok sosial kedua ditempati oleh bangsawan Melayu, pengusaha Cina, dan orang bumiputra berpendidikan Barat. Adapun kelompok sosial terbawah dalam stratifikasi masyarakat Kota Medan adalah orang Cina dan orang bumiputra kebanyakan, serta para perantau lainnya (Pelly, 2013). Dari stratifikasi masyarakat yang dikemukakan Usman Pelly, dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Medan yang dikategorikan sebagai orang Timur Asing lainnya (*Andere Vreemde Oosterlingen*) termasuk dalam kelompok sosial terbawah.

Pembagian ruang kota berdasarkan penguasaan tanah masih ditambah dengan segregasi pemukiman berdasarkan ras. Pemukiman orang Eropa terkonsentrasi di Polonia yang terletak di antara Sungai Deli dan Sungai Babura. Di sebelah barat pemukiman Eropa terdapat pemukiman orang India. Sementara itu, pemukiman orang Arab terletak di dekat pasar lama. Pemukiman orang Cina berada di sekitar Kesawan, sedangkan orang bumiputra bertempat tinggal di pinggiran kota (Pelly, 2013; Perret, 2010). Kawasan permukiman tersebut seperti Kota Maksom, yang ditempati oleh keluarga Kesultanan Deli dan penduduk Melayu. Selain itu terdapat juga penduduk pendatang yang

mengambil bagian di kawasan tersebut seperti etnis Minangkabau dan Aceh. Lain halnya dengan penduduk pendatang lainnya seperti etnis Mandailing, mereka lebih eksklusif dengan mendirikan permukiman sendiri di kawasan Gelugur, Kampung Baru dan Sei Mati.

Segregasi pemukiman berdasarkan garis ras merupakan karakter khas dari kota-kota kolonial, dan Medan telah menampilkan karakter tersebut. Segregasi pemukiman berdasarkan ras di Kota Medan merupakan implementasi dari peraturan tempat tinggal (*wijkenstelsel*) yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada tahun 1866. Pembagian pola permukiman penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan *Gemeente* Medan adalah untuk mempermudah penerapan regulasi dan peraturan serta menunjukkan diskriminasi antar kelompok dan etnis. Orang Eropa menempati puncak tertinggi dalam lapisan sosial masyarakat di *Gemeente* Medan, selanjutnya adalah kelompok bangsawan dan keluarga Kesultanan Deli sebagai golongan menengah ke atas. Kemudian kelompok pedagang Cina dan pegawai pemerintah Bumiputera menempati golongan menengah rendah dan terakhir para buruh kasar kota dan kuli Bumiputera menempati strata yang paling rendah (Suprayitno, 2001).

Citra Perempuan dalam Kehidupan Beragama Masyarakat Sumatera Timur

Mayoritas agama yang dianut masyarakat Sumatera Timur adalah Islam, namun penganut agama atau kepercayaan lain juga tidak sedikit dan masih banyak pula masyarakat asli Sumatera Timur di beberapa wilayah yang teridentifikasi tidak menganut agama, tetapi mereka masih menganut sistem kepercayaan lainnya, seperti Parmalim dan lainnya. Berikut jumlah penganut agama dan kepercayaan masyarakat asli (*native*) yang dikumpulkan dari beberapa wilayah Sumatera Timur pada sensus penduduk yang dilakukan pemerintah kolonial pada tahun 1930.

Tabel 4. Jumlah penganut agama dan kepercayaan masyarakat asli (*native*) di beberapa wilayah Sumatera Timur tahun 1930

No	Wilayah	Agama/Kepercayaan yang dianut			
		Islam	Protestan	Katolik Roma	Kafir/Pagan
1	Afdeling Bataklanden	23969	238690	11	258472
2	Afdeling Sibolga	23444	9139	11	5468
3	Afdeling Padang Sidempuan	265309	11712	12	82
4	Afdeling Nias	13711	91458	0	92070
5	Afdeling Simalungun dan Tanah Karo	137944	33280	45	163448
6	Langkat	69741	191	0	26048
7	Binjai	4595	113	3	23
8	Deli	22522	763	7	25045
9	Serdang	107981	462	11	21263
10	Bedagai	75722	216	13	5609
11	Tebing Tinggi	8009	272	5	33
12	Asahan	111162	589	0	5131
13	Tanjung Balai	5692	232	12	12
14	Labuhan Batu	122491	595	7	900
Total		992.292	387.712	137	603.606

Sumber: *Volkstelling 1930*

Citra Perempuan pada masa kolonial yang ada dalam iklan-iklan surat kabar dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu perempuan pesolek, perempuan rumah tangga, dan perempuan aktif/berkarier (Ningsih, 2009). Citra perempuan pesolek lebih merujuk kepada citra diri, sedangkan citra perempuan aktif/karier lebih mengarah kepada citra sosial perempuan karena berinteraksi dengan dunia publik. Kedua konsep citra perempuan tersebut yang dibahas dalam kajian ini, yaitu citra diri dan citra sosial. Antara citra diri dan citra sosial memang saling berkaitan, jadi sangat mungkin narasi keduanya saling mengisi satu dengan yang lainnya.

Perempuan kolonial dalam kajian ini adalah perempuan yang hidup pada masa kolonial di Sumatera Timur. Mereka adalah perempuan yang berasal dari berbagai ras, suku bangsa, agama dan tempat tinggal. Perempuan tersebut adalah Perempuan Eropa, Timur Asing, pribumi setempat, dan pribumi pendatang. Selanjutnya dinarasikan tentang citra diri perempuan kolonial di Sumatera Timur dalam periode waktu 1870-1942. Perempuan kolonial pertama yang dibahas adalah Perempuan Melayu (Pribumi). Perempuan Melayu adalah representasi perempuan pribumi lainnya yang beragama Islam. Sejak awal, Islam sudah menjadi agama mayoritas di Sumatera Timur. Keberadaan kesultanan yang ada di wilayah Sumatera Timur memperjelas keislaman masyarakatnya. Perempuan Melayu sudah pasti beragama Islam, namun tidak banyak ditemukan data perempuan Melayu yang terekspos dalam aktivitas keagamaan sebelum abad 20. Jika saat ini kita langsung dapat mengidentifikasi perempuan muslim dengan jilbab/hijabnya, tidak begitu dengan perempuan pada abad 19, namun perempuan pada masa itu sudah menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup.



Gambar 1: Perempuan Muslim Melayu pada tahun 1889

Sumber: KITLV

Gambaran perempuan yang tampak dalam foto di atas adalah gambaran perempuan melayu di Sumatera Timur. Hampir seluruh perempuan Islam Melayu di Sumatera Timur pada periode 1872-1942 menggunakan bawahan berupa rok/kain sarung, atasan berupa baju panjang dengan bahan yang beragam dan kain sarung yang menutupi kepala mereka. Selain kain sarung, ada pula yang menggunakan selendang panjang untuk menutupi kepala mereka. Citra diri seperti itu adalah citra diri perempuan muslim sehari-hari, namun dalam beragama belum ditemukan data yang mendukung. Akan tetapi, dalam Hukum Islam, Perempuan wajib menutup aurat mereka saat salat dan melakukan ritual keagamaan lainnya. Sampai dekade kedua abad ke-20 M, kemunculan perempuan muslim dalam kegiatan publik tidak banyak terekspos, hingga kemunculan organisasi Aisyah, organisasi perempuan muslim Muhammadiyah. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan, dalam suatu Mukhtar Aisyah pada tahun 1923, terlihat gambaran diri perempuan-perempuan muslim pada saat itu. Tidak jauh berbeda dengan perempuan melayu, perempuan Minang juga menunjukkan gambaran diri perempuan muslim. Ada sedikit yang berbeda, yaitu bahwa perempuan Minang menggunakan *tingkuluak tanduak* untuk menutup kepala mereka. Perempuan Minang juga mayoritas beragama Islam.



Gambar 2: Kongres Aisyah pada tahun 1928

Sumber: KITLV

Berbeda dengan perempuan Melayu Islam, Perempuan Jawa tidak menggunakan penutup kepala. Perempuan Jawa, meskipun beragama Islam, tingkat aktualisasi nilai keislaman dalam berpenampilan masih rendah. Mereka belum menutup aurat sebaik perempuan Melayu dan perempuan Minang. Cara berpenampilan mereka adalah ciri khas perempuan Jawa, yang menggunakan jarik dan atasan kebaya.

Perempuan Batak, mewakili perempuan beragama Kristen dari kalangan masyarakat asli, namun sebagian dari mereka juga masih mempertahankan kepercayaan mereka (Parmalim). Dalam data tabel agama yang dianut masyarakat asli, orang-orang Batak menjadi jumlah penganut Kristen Protestan terbesar dari kalangan masyarakat asli. Perempuan batak yang ditampilkan dalam gambar berikut adalah citra diri perempuan Batak saat mengikuti ritual keagamaan Parmalim.



Gambar 3: Perempuan Batak menari, melaksanakan ritual Parmalim

Sumber: Deli Courant, 1910

Selanjutnya adalah Perempuan Eropa, dalam tabel data jumlah orang Eropa yang ada di Sumatera Timur, khususnya Kota Medan pada tahun 1930, keseluruhan jumlah orang Eropa yang berasal dari berbagai negara adalah 4.293 orang. Dari total keseluruhan orang Eropa tersebut, terdapat 2001 perempuan Eropa. Mereka datang secara bertahap sejak dekade terakhir abad 19 hingga awal

abad ke-20 M. Masuknya perempuan-perempuan Belanda ke Hindia-Belanda mempengaruhi berkembangnya pemahaman kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki pada awal abad kedua puluh. Mereka juga membawa pengaruh terhadap modernisasi perempuan-perempuan pribumi dalam bidang lainnya, misalnya dalam cara berpakaian. Cara berpakaian perempuan Eropa dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan cara berpakaian mereka saat ke gereja. Mereka menggunakan pakaian yang cantik dan mewah saat pergi ke gereja. Mereka menggunakan gaun panjang yang menjadi khas dari perempuan Eropa.

SIMPULAN

Keragaman etnis dan agama yang ada di Sumatera Timur adalah salah satu dampak dari adanya perkebunan tembakau yang dimulai sejak akhir abad 19 dan mencapai puncaknya pada dekade kedua awal abad ke-20 M. Dalam sensus penduduk (*Volkstelling*) pada tahun 1930, ditemukan data bahwa dari total jumlah penduduk pada saat itu adalah 76.854 orang, terdiri dari orang Eropa, Cina, India dan Masyarakat Asli. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Sumatera Timur adalah Islam, namun penganut agama atau kepercayaan lain juga tidak sedikit dan masih banyak pula masyarakat asli Sumatera Timur di beberapa wilayah yang teridentifikasi tidak menganut agama, tetapi mereka masih menganut sistem kepercayaan lainnya, seperti Parmalim dan lainnya. Keragaman tersebut memunculkan pelabelan agama terhadap masyarakat Sumatera Timur. Orang Eropa adalah penganut Kristen, baik Katolik ataupun Protestan, orang Cina penganut Buddha, India penganut Hindu serta masyarakat asli yang mayoritas beragama Islam dan juga sebagian masyarakat asli beragama Kristen Agama menjadi entitas penting yang kerap dijadikan sebagai “alat” dalam berbagai kepentingan, termasuk politik. Selanjutnya adalah kehadiran perempuan dalam kehidupan beragama masyarakat Sumatera Timur. Masing-masing dari perempuan dari entitas-entitas agama merepresentasikan dan mencitrakan diri mereka dengan cara yang berbeda.

REFERENSI

- Avan, A. (2010). *Parijs Van Soematera*. Medan: Rainmaker Publishing House.
- Batubara, T. (2020). Memutar Sejarah “Gambar Idoep” Masa Silam: Industri Perfilman dan Dampaknya di Medan pada Era Kolonial Belanda sampai Orde Baru. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(1), 14-19.
- Blackburn, S. (2011). *Jakarta 400 Tahun*. Jakarta: Masup.
- Blink, H. (2018). *Sumatra's Oostkust in Kare Opkomst en Ontwikkeling Als Economisch Gewest: Eene Economisch-Geographische En -Historische Studie*. New South Wales: Generic.
- Broersma, R. (1932). *Oostkust van Sumatra: De Ontwikkeling van het Gewest*. The Hague-Charles Dixon: Deventer.
- Buiskool, D. A. (2005). Medan A Plantation City on the East Coast of Sumatra 1870-1942. In *Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Couperus, L. (1992). *Oostwaarts Louis Couperus*. Amsterdam: Antwerpen.
- De Sumatra Post. (1921, May 31). *De Sumatra Post*.
- Jansen, G. (1925). *Grantrechten in Deli*. Medan: Oostkust van. Sumatra-Institut.
- Kuntowijoyo. (2021). *Metodologi Sejarah* (cetakan V; M. Yahya, Ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ningsih, W. F. (2009). Citra Perempuan dalam Pariwara di Hindia Belanda Tahun 1900-1942. In *Kota-kota di Jawa: Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Passchier, C. (1995). Medan; Urban Development by Planters and Entrepreneurs 1870-1940. In *Issues in Urban Development; Case Studies from Indonesia*. Netherlands: Research School CNWS.
- Pelly, U. (2013). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Kota Medan*. Medan: Unimed Press dan Casa Mesra.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947* (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pewart Deli. (1923, November 17). *Pewart Deli*.

- Pewartar Deli. (1928, June 11). *Pewartar Deli*.
- Pewartar Deli. (1936, April 28). *Pewartar Deli*.
- Said, M. (1977). *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Waspada.
- Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur Tahun 1800-1975*. (1978). Bandung: Alumni.
- Sinar Deli. (1932, September 3). *Sinar Deli*.
- Sinar, T. L. (1991). *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
- Stoler, A. L. (2005). *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*. Yogyakarta: Karsa.
- Suprayitno. (2001). *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia, Dari Federalisme ke Unitarisme: Studi Tentang Negara Sumatera Timur 1947-1950*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Verslag Betreffende de Gemeente Medan over het Jaar 1919*. (1920). Medan: Varekamp & Co.
- Verslag Betreffende De Gemeente Medan Over Het Jaar 1926*. (1927). Medan: Varekamp & Co.
- Volkstelling 1930 Deel V*. (1935). Batavia: Departemen van Economische Zaken.
- Wasino. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Pustaka Magnum.
- Weilsfelt, J. (1972). *De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra*. Rotterdam: Bronder-Offset.